

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK DIPILIH
MELALUI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
PEMILIHAN UMUM**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



**RAHMAT BAGJA
2030112017**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK DIPILIH MELALUI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Rahmat Bagja, 2030112017, 396 halaman, Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

Hak untuk dipilih dalam Pemilu merupakan aspek fundamental yang harus dijamin dan dipenuhi. Segala bentuk pelanggaran maupun sengketa terkait hak untuk dipilih dalam pemilu tersedia akses pencarian keadilan melalui penegakan hukum administrasi pemilu di Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih masih parsial dan belum sepenuhnya memberikan jaminan khususnya pada perkara terkait persyaratan pencalonan anggota DPD yang berstatus pengurus partai politik, mantan terpidana dan keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan. Penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih, memerinci hambatan dalam sistem penegakan hukum administrasi pemilu dan menemukan sistem penegakan hukum administrasi pemilu yang ideal untuk menjamin pemenuhan hak dipilih dalam Pemilu. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal/normatif, penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi Pemilu dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang bersifat korektif atau punitif berupa pemulihan atau pembatasan hak pencalonan peserta Pemilu/kandidat; *Kedua*, Pemenuhan jaminan hak untuk dipilih masih mengalami hambatan normatif berupa perubahan norma di tengah tahapan pemilu dan ketentuan multitafsir maupun hambatan kelembagaan berupa tugas dan wewenang penegakan hukum administrasi pemilu dilakukan oleh multi-institusi yang tidak terkoneksi dan kesiapan teknis penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti putusan penegakan hukum administrasi pemilu; dan *Ketiga*, model ideal penegakan hukum administrasi Pemilu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih yakni (1) pencegahan maladministrasi Pemilu; dan (2) sistem penegakan hukum administrasi Pemilu yang saling terhubung pada masing-masing institusi (*electoral justice in many connected rooms*).

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak untuk dipilih, Pemilu, penegakan hukum administrasi Pemilu.

ABSTRACT

PROTECTING THE RIGHT TO BE ELECTED THROUGH THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE ELECTORAL LAW

Rahmat Bagja, 2030112017, 396 Pages, Doctoral Program in Law, Faculty of
Law, Andalas University, 2025

The right to be elected in general elections is a fundamental aspect of democratic participation that must be guaranteed and fulfilled. Legal remedies for any violations or disputes concerning this right are accessible through the enforcement of electoral administrative law by the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Administrative Court, and the Constitutional Court. In practice, however, legal protection for the right to be elected remains partial and insufficient, particularly in cases related to candidacy requirements for Regional Representative Council (DPD) candidates who are political party officials, former convicts, or those affected by the women's representation quota. This study analyzes the forms of legal protection for the right to be elected, outlines the obstacles within the electoral administrative law enforcement system, and seeks an ideal model to ensure the fulfillment of this right in elections. Employing a doctrinal/normative legal research method, the study finds that: First, legal protection through electoral administrative law enforcement includes both preventive measures and repressive remedies—either corrective or punitive—such as the restoration or restriction of candidacy rights. Second, the fulfillment of the right to be elected is hindered by normative challenges, including mid-election legal changes and ambiguous regulations, as well as institutional obstacles such as uncoordinated authority among enforcement institutions and the limited technical capacity of electoral management bodies to implement rulings. Third, the ideal model of electoral administrative law enforcement for protecting the right to be elected involves: (1) the prevention of electoral maladministration, and (2) the establishment of an interconnected enforcement system across all relevant institutions—an approach that embodies the principle of *electoral justice in many connected rooms*.

Keywords: Legal protection, right to be elected, elections, electoral administrative law enforcement.